

Analisis Penetapan Biaya Sekolah atas Dana Bantuan Operasional Daerah (Studi Komparasi pada SMP Negeri 2 Depok dan SMP Muhammadiyah 3 Depok di Kabupaten Sleman)

Monilia Annisa^{1*} dan Aviandi Okta Maulana²

¹Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

²Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan biaya sekolah atas pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SMP Negeri 2 Depok dan SMP Muhammadiyah 3 Depok. Studi dilakukan dengan pendekatan kualitatif komparatif menggunakan metode *activity-based costing* untuk menghitung biaya satuan per siswa, serta wawancara mendalam dan tinjauan dokumen untuk mengkaji pengelolaan dan kecukupan dana BOSDA. Hasil menunjukkan perbedaan dan persamaan antara kedua sekolah. Perbedaan terletak pada jumlah dan jenis sumber dana, serta hasil selisih antara metode ABC dengan metode perhitungan sekolah. Di sisi lain, kedua sekolah menunjukkan persamaan berupa variasi biaya satuan antar jenjang dan program pendidikan, serta menerapkan tahapan penetapan biaya meliputi perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan. Praktik isomorfisme koersif ditunjukkan kedua sekolah melalui kepatuhan terhadap regulasi, dan isomorfisme normatif melalui partisipasi dalam bimbingan teknis serta pemenuhan kompetensi kepala sekolah. SMP Negeri 2 Depok menghadapi keterbatasan dana akibat ketergantungan pada sumber dana, sementara SMP Muhammadiyah 3 Depok lebih fleksibel secara finansial namun tetap menghadapi tantangan pengeluaran insidental. Temuan ini memberikan saran bagi pengambil kebijakan dan pengelola sekolah dalam mengalokasikan serta mengelola dana BOSDA secara lebih proporsional dan adaptif sesuai kebutuhan sekolah.

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat artikel

Tanggal masuk 10 Juli 2025

Versi revisian diterima 29

September 2025

Diterima 8 Oktober 2025

Kata kunci

penetapan biaya sekolah, dana BOSDA, *activity-based costing*, teori institusional isomorfisme.

ISSN: 2302-1500

*Corresponding Author at Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

email: moniliaannisa@mail.ugm.ac.id (author#1)

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea keempat, pendidikan merupakan salah satu tujuan bernegara. UUD 1945 Pasal 31 mengatur bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional pun diperkuat dengan penyusunan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Implementasi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia saat ini dijalankan oleh dua sektor utama, yaitu pemerintah dan swasta (Fadoli dkk., 2021). Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mendirikan dan mengelola sekolah-sekolah negeri di semua jenjang pendidikan (Peraturan Pemerintah (PP) 17/2010). Sementara itu, sekolah swasta umumnya dikelola oleh yayasan atau lembaga nonpemerintah lainnya (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) 36/2014). Berdasarkan Permendikbud 44/2012, sekolah negeri mendapat sumber biaya pendidikan dari anggaran Pemerintah, sumbangan, dan bantuan, serta tidak diperkenankan memungut biaya dari peserta didik. Di sisi lain, sekolah swasta memiliki kewenangan untuk memungut biaya pendidikan dari siswa atau orang tua/wali.

Siswa yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah cenderung memilih sekolah dengan biaya pendidikan yang lebih terjangkau atau bahkan gratis sebagai opsi pendidikan (Ajzenman dkk., 2020). Sementara itu, biaya pendidikan di sekolah swasta yang cenderung tinggi tidak menurunkan minat banyak orang tua untuk memilih sekolah swasta karena penawaran kualitas pendidikan dan reputasinya baik (Perwita dan Widuri, 2022). Kehadiran sekolah swasta bersubsidi dalam pendidikan memperluas variasi pilihan sekolah, tetapi memicu persaingan antara sekolah swasta dan sekolah negeri (Zancajo dkk., 2022).

Sejalan dengan pentingnya kualitas pendidikan dalam pemilihan sekolah, penyelenggaraan pendidikan memiliki keterkaitan yang erat dengan aspek pembiayaan (Saputra, 2018). Pembiayaan dalam pendidikan menjadi faktor penting untuk menunjang proses pendidikan sehingga aspek

ketersediaan anggaran harus terpenuhi (Putri, 2019). Komitmen negara terhadap pembiayaan pendidikan tecermin dalam amanat Pasal 31 UUD 1945 yang mewajibkan alokasi anggaran pendidikan sebesar minimal 20 persen dari belanja negara.

Salah satu bentuk alokasi anggaran pendidikan adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Saputra, 2018). Dana BOS bertujuan meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pendidikan wajib belajar 9 tahun (Permendikbud 80/2015). Namun, pelaksanaan BOS di beberapa wilayah menghadapi sejumlah tantangan, antara lain penyaluran dana yang tidak optimal sesuai kebutuhan sekolah, keterlambatan pencairan, hingga indikasi penyalahgunaan dana (Akbar, 2016).

Beberapa pemerintah daerah pun berupaya untuk mengatasi kesenjangan antara dana BOS yang diberikan kepada sekolah dan biaya operasional untuk memenuhi kebutuhan sekolah dengan menyelenggarakan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) (Maidah dkk., 2018). Peraturan Bupati (Perbup) Sleman 24/2022 menetapkan bahwa BOSDA diberikan untuk membebaskan siswa di sekolah negeri dari biaya sekolah dan mengurangi beban biaya pendidikan siswa di sekolah swasta. Berdasarkan Perbup Sleman 24/2022, pemberian BOSDA kepada sekolah negeri dilaksanakan sejalan dengan rencana kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Sementara itu, bagi sekolah swasta, BOSDA diberikan melalui mekanisme hibah. Meskipun demikian, sekolah dengan jumlah siswa yang sedikit tetap menghadapi ancaman penurunan pendapatan.

Penurunan pendapatan dapat menyebabkan sekolah kekurangan biaya untuk memenuhi kebutuhan sekolah secara optimal (Rekasari, 2020). Penurunan pendapatan tersebut berpotensi menurunkan kualitas layanan pendidikan dan melemahkan daya tarik sekolah di mata masyarakat (Khattak dkk., 2010). Di sisi lain, sekolah swasta memiliki fleksibilitas dalam memperoleh pendanaan dari masyarakat melalui pungutan kepada orang tua/wali siswa, sedangkan

sekolah negeri tidak diperbolehkan melakukan pungutan tersebut (Permendikbud 44/2012).

Data dari Zuilkowski dkk. (2018) menunjukkan bahwa sebagian orang tua memilih sekolah negeri karena alasan biaya dan lokasi, tetapi tidak sedikit pula yang menyatakan ketidakpuasan karena performa siswa yang dinilai kurang baik. Hal ini memperkuat bahwa persepsi terhadap kualitas pendidikan menjadi salah satu faktor utama dalam keputusan memilih sekolah (Khattak dkk., 2010). Di sisi lain, pemberian dana BOSDA dengan nominal yang sama kepada sekolah negeri dan swasta tanpa mempertimbangkan perbedaan karakteristik dan aktivitas pendidikan menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dana efektivitas kebijakan tersebut.

Permasalahan terkait penyaluran dana BOS dan BOSDA yang tidak optimal, keterlambatan pencairan, hingga indikasi penyalahgunaan dana menunjukkan adanya persoalan transparansi dan akurasi dalam perencanaan pembiayaan sekolah (Zainudin, 2019). Kondisi ini menegaskan pentingnya metode perhitungan biaya yang mampu menggambarkan kebutuhan riil sekolah secara adil dan proporsional. Metode perhitungan biaya tradisional umumnya hanya membagi biaya secara merata atau berdasarkan rasio tertentu, sehingga hasilnya kurang mencerminkan aktivitas nyata sekolah (Hansen dan Mowen, 2007). Salah satu pendekatan yang dinilai relevan adalah *activity-based costing* (ABC) karena dapat mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas nyata yang dilakukan sekolah (Putra dan Firmansyah, 2022). Dengan demikian, penggunaan metode ABC berpotensi menghasilkan dasar perhitungan biaya yang lebih akurat dibanding metode tradisional, sekaligus menjadi rujukan bagi pengelolaan dan penyaluran BOSDA agar lebih tepat sasaran (Hansen dan Mowen, 2007).

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki reputasi yang layak sebagai Kota Pelajar dan dianggap sebagai proyek percontohan pendidikan dari perspektif administrasi dan anggaran (Hayatunnida dan Shaleh, 2022). Kabupaten Sleman sebagai salah satu wilayah di DIY tercatat memiliki jumlah SMP terbanyak (Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan

Dasar dan Pendidikan Menengah, 2023). Alokasi dana satu tahun yang diterima pun terbesar di DIY (Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) 3/P/2023). Namun, dana BOS yang disalurkan merupakan satuan biaya terendah di DIY, yaitu Rp1.100.000 per siswa (Keputusan Mendikbudristek 3/P/2023). Sementara alokasi BOSDA berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun 2020 kepada SMP Negeri sebesar Rp555.000 dan SMP Swasta sebesar Rp405.000 per siswa per tahun.

SMP Negeri 2 Depok dan SMP Muhammadiyah 3 Depok, meskipun tidak termasuk dalam kategori sekolah unggulan secara umum, memiliki capaian prestasi yang baik, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. SMP Negeri 2 Depok telah meraih berbagai penghargaan dalam lomba mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler tingkat kabupaten hingga nasional, seperti peringkat 2 tingkat nasional di bidang taekwondo tahun 2018 dan peringkat 1 tingkat provinsi pada Liga Anak Yogya tahun 2013 (Aku Pintar, 2024). Sementara itu, SMP Muhammadiyah 3 Depok atau Mugadeta, sebagai sekolah swasta, juga menunjukkan prestasinya terutama di bidang robotik dengan menjuarai ajang Thailand Robotic Training and Competition pada 2018 di Yala Technical College, Thailand (Suara Muhammadiyah, 2018). Capaian prestasi yang dimiliki kedua sekolah menuntut penetapan biaya yang akurat agar alokasi dana per siswa dapat dimanfaatkan secara tepat. Oleh karena itu, penyaluran dana BOSDA perlu diselaraskan dengan kebutuhan aktual sekolah dan karakteristik kegiatan yang dilaksanakan.

Untuk memahami dinamika organisasi sekolah dalam penetapan biaya, digunakan pendekatan teori institusional isomorfisme dalam kerangka analisis. Teori ini menjelaskan bahwa keseragaman kebijakan atau praktik antar organisasi, termasuk sekolah, muncul akibat tekanan regulatif (koersif), peniruan dari lembaga lain yang dianggap sukses (mimetik), dan dorongan dari norma profesional (normatif) (Winarni dan Zamakhsyari, 2021; DiMaggio dan Powell, 1983). Pendekatan ini relevan dalam mengkaji bagaimana kebijakan penetapan biaya

sekolah atas dana BOSDA dikembangkan dan diterapkan di sekolah negeri maupun swasta.

B. TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Institusional Isomorfisme

Teori institusional isomorfisme menjadi acuan utama dalam menjelaskan struktur dan perubahan organisasi, terutama di sektor publik, karena interaksi organisasi-organisasi tersebut kompleks dan dipengaruhi oleh lingkungan eksternal (Ahyaruddin dan Akbar, 2018). Menurut DiMaggio dan Powell (1983), organisasi masih cenderung memiliki homogenitas yang tinggi, dan birokrasi tetap menjadi bentuk organisasi yang dominan. Isomorfisme adalah fenomena di mana lembaga-lembaga dalam suatu lingkungan cenderung menjadi seragam dalam hal tujuan sosial, politik, atau legitimasi karena dipengaruhi oleh tekanan sosial dan politik yang intens (Winarni dan Zamakhsyari, 2021). Tiga mekanisme isomorfisme institusional mencakup isomorfisme koersif, yang disebabkan oleh tekanan dari negara atau masyarakat; isomorfisme mimetik, yang timbul karena ketidakpastian sehingga organisasi meniru organisasi lain; serta isomorfisme normatif, yang dipengaruhi oleh norma-norma profesi (DiMaggio dan Powell, 1983).

Teori institusional isomorfisme dalam penelitian ini relevan untuk menjelaskan alasan di balik kesamaan dan perbedaan praktik penetapan biaya dana BOSDA di sekolah negeri dan swasta. Misalnya, tekanan dari pemerintah daerah untuk menyusun laporan pertanggungjawaban dapat dilihat sebagai bentuk isomorfisme koersif. Sementara itu, adopsi metode atau struktur pelaporan yang dilakukan oleh sekolah swasta dengan meniru praktik di sekolah negeri dapat merupakan bentuk isomorfisme mimetik. Selain itu, adanya tuntutan dari tenaga administrasi atau kepala sekolah yang memiliki latar belakang profesional tertentu turut menunjukkan isomorfisme normatif. Dengan demikian, teori ini memberi kerangka analitis untuk memahami bahwa praktik penetapan biaya tidak hanya didorong oleh kebutuhan teknis, tetapi juga oleh tekanan institusional yang melekat pada lingkungan pendidikan, sehingga relevan

digunakan sebagai lensa untuk menjelaskan bagaimana kebijakan BOSDA mendorong keseragaman praktik penetapan biaya antara sekolah negeri dan swasta meskipun berada pada kondisi yang berbeda.

2. Activity-Based Costing

Penetapan besaran biaya satuan (*unit cost*) diperlukan untuk mendapatkan biaya rata-rata per siswa dalam memperoleh pendidikan yang dikeluarkan dalam satu tahun pelajaran (Sumardiningih dkk., 2018). Horngren dkk. (2008) mengungkapkan bahwa penerapan ABC, metode perhitungan biaya berbasis aktivitas, merupakan cara paling efektif untuk meningkatkan sistem perhitungan biaya. ABC adalah metode akuntansi biaya yang memperkirakan total biaya layanan atau produk, termasuk biaya langsung tenaga kerja dan bahan serta biaya tidak langsung dari aktivitas pendukung (Lawrentiis dan Simbolon, 2014).

Hansen dan Mowen (dalam Sumardiningih dkk., 2018) menjelaskan bahwa langkah-langkah penerapan ABC terdiri atas identifikasi aktivitas dan atributnya, alokasi biaya ke aktivitas, pengelompokan ke dalam kelompok biaya, serta alokasi akhir ke objek biaya. Dengan pendekatan ini, perhitungan biaya tidak hanya membagi rata anggaran, tetapi menyesuaikan dengan kebutuhan aktual yang timbul dari aktivitas di sekolah.

Beberapa penelitian menunjukkan relevansi penggunaan ABC dalam konteks pendidikan. Coskun dan Yilmaz (2013) meneliti penetapan biaya pendidikan di SMA swasta di Turki menggunakan metode ABC dan menemukan bahwa lembaga pendidikan kerap kali menentukan biaya tanpa perhitungan yang akurat. Sumardiningih dkk. (2018) menerapkan metode ABC di SMKN 2 Yogyakarta dan menemukan bahwa metode ini dapat menghitung *unit cost* per siswa secara lebih adil berdasarkan jenjang dan paket keahlian. Andreti (2016) menambahkan bahwa meskipun besaran dana BOS dan BOSDA seragam, *unit cost* siswa tetap berbeda-beda, yang mengindikasikan keunggulan ABC dalam akurasi identifikasi kebutuhan biaya.

Berdasarkan kajian tersebut, penerapan ABC dalam penelitian ini dianggap tepat untuk menganalisis penerapan biaya pendidikan di sekolah negeri dan swasta penerima BOSDA. Metode ini dapat memberikan gambaran biaya yang lebih akurat, transparan, dan relevan dengan kebutuhan operasional sekolah, sekaligus menjadi dasar pertimbangan dalam penyaluran BOSDA agar lebih efektif dan tepat sasaran.

3. Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) 2/2022 mendefinisikan dana BOS sebagai sumber dana yang utamanya digunakan untuk mendukung belanja non-personalia di sekolah-sekolah dasar dan menengah dalam pelaksanaan program wajib belajar. Permendikbud 80/2015 mengatur bahwa tujuan utama dari program BOS bagi sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) adalah untuk meringankan tanggungan masyarakat dalam membiayai wajib belajar 9 tahun. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 9/PMK.07/2020 bahwa penyaluran dana BOS dikirimkan langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening sekolah.

Dana BOSDA di Kabupaten Sleman diatur dalam Perbup Sleman 24/2022. Aturan tersebut mendefinisikan dana BOSDA sebagai bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai aspek operasional sekolah, termasuk dalam kategori pengeluaran operasional sekolah dan upaya peningkatan manajemen mutu. Pada jenjang pendidikan dasar, BOSDA bertujuan meringankan beban biaya pendidikan siswa di sekolah negeri dan mendukung pembiayaan operasional sekolah swasta guna mengurangi beban biaya dari peserta didik. Pemberian BOSDA kepada sekolah negeri didasarkan pada program kegiatan Pemerintah Daerah dan disalurkan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di sisi lain, BOSDA bagi sekolah swasta, Madrasah Ibtidaiyah, dan Madrasah Tsanawiyah disalurkan melalui mekanisme hibah dengan dasar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) (Perbup Sleman 24/2022).

C. METODE RISET

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi komparatif terhadap SMP Negeri 2 Depok dan SMP Muhammadiyah 3 Depok di Kabupaten Sleman. Menurut Creswell (2016), penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari pengalaman individu atau kelompok dalam suatu konteks sosial. Sementara itu, Todd dan Hudson (2007) menyebutkan bahwa studi komparatif digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih objek berdasarkan kerangka analisis tertentu. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menggali secara mendalam dinamika penetapan biaya sekolah pada dua jenis sekolah yang berada dalam konteks kebijakan BOSDA, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penerapan biaya pendidikan.

Komparasi dalam penelitian ini difokuskan pada dua aspek utama: pertama, perbandingan metode perhitungan biaya satuan pendidikan menggunakan pendekatan ABC dengan metode perhitungan yang diterapkan masing-masing sekolah; kedua, hasil wawancara mendalam yang mengungkap proses dan pertimbangan dalam penetapan biaya sekolah atas dana BOSDA. Pemilihan objek dilakukan melalui *purposive sampling* dengan mempertimbangkan kesamaan jumlah kelas, prestasi ujian nasional, dan alokasi dana BOS.

Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Tim BOS, yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara, dan anggota, sesuai dengan Permendikbudristek 63/2022, serta melalui analisis dokumen seperti data siswa, guru dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, realisasi RKAS/RAPBS, dan laporan kas komite. Analisis data dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama, analisis biaya pendidikan dengan metode ABC digunakan untuk menghitung dan membandingkan biaya satuan pendidikan yang ditetapkan di masing-masing sekolah. Kedua, analisis data kualitatif diterapkan untuk memahami konteks pengelolaan dana BOSDA, dengan menggunakan model Miles dan Huberman

(1994) yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan *member checking* kepada informan untuk memastikan akurasi informasi. Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan aspek reliabilitas dengan menjaga konsistensi prosedur pengumpulan dan pengolahan data, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Responden

Responden dari SMP Negeri 2 Depok meliputi kepala sekolah, bendahara, dan pembantu bendahara. Sekolah memiliki 12 rombongan belajar dengan 384 siswa, 29 tenaga pendidik, dan 6 tenaga kependidikan. Sarana prasarana terdiri atas 52 ruang kelas dengan luas gedung 4.127 m². Pendapatan sekolah berasal dari dana BOS reguler sebesar Rp424.600.000, dana BOSDA Rp214.230.000, dan sumbangan sukarela orang tua/wali murid, dengan total Rp638.830.000.

Di SMP Muhammadiyah 3 Depok, responden meliputi kepala sekolah, bendahara, dan staf keuangan kasir. Sekolah ini memiliki 12 rombongan belajar dengan total 394 siswa pada tahun ajaran 2022/2023, 26 tenaga pendidik, dan 8 tenaga kependidikan. Sarana prasarana mencakup 27 ruang dengan luas gedung 3.038,1 m². Sumber pendapatan meliputi dana BOS reguler Rp433.400.000, dana BOSDA Rp200.940.000, pembayaran SPP Rp614.640.000, dana komite Rp2.289.332.000, dan dana lain sebesar Rp30.584.000, sehingga total pendapatan mencapai Rp3.568.896.000.

2. Biaya Satuan Pendidikan dengan Metode *Activity-Based Costing*

Identifikasi dan Penggolongan Aktivitas

Aktivitas dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi aktivitas utama dan aktivitas penunjang berdasarkan golongan aktivitasnya serta metode pembebanan biayanya. Aktivitas utama meliputi belajar mengajar dan kesiswaan yang termasuk dalam *result-producing activities* dengan

pembebanan biaya menggunakan metode *direct tracing*, *driver tracing*, dan *proportional allocation*. Sedangkan aktivitas penunjang terdiri dari pengembangan sekolah non-SDM dan pengembangan sekolah SDM yang termasuk dalam *support activities* dengan pembebanan biaya *driver tracing*, administrasi sekolah sebagai *support activities* dengan pembebanan biaya *proportional allocation*, serta manajemen sekolah dan pengelolaan sarana prasarana yang masuk dalam *result-contributing activities*, masing-masing menggunakan metode *proportional allocation* dan *driver tracing* untuk pembebanan biayanya.

Pembebanan Biaya ke Aktivitas dan Pembebanan Biaya Antar-Aktivitas

SMP Negeri 2 Depok

Di SMP Negeri 2 Depok, pembebanan biaya daya dan jasa meliputi pengeluaran untuk listrik, telepon, internet, dan air, yang dialokasikan berdasarkan luas ruangan sebagai *cost driver*. Hal ini sesuai dengan temuan Bhattacharjee dan Reichard (2011) yang menyatakan bahwa luas bangunan berpengaruh terhadap konsumsi energi. Total luas bangunan sekolah mencapai 4.127 m² dengan biaya daya dan jasa sebesar Rp46.472.667. Biaya tersebut dialokasikan ke berbagai aktivitas sekolah menggunakan tarif *cost driver* yang dihitung dari total biaya dibagi luas bangunan dan menghasilkan tarif Rp11.260,64 per m².

Selain itu, aktivitas pengembangan SDM di SMP Negeri 2 Depok mencakup pengeluaran untuk kegiatan peningkatan kompetensi guru dan karyawan, seperti KKG/MGMP, pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan pembinaan tenaga kependidikan, dengan total biaya sebesar Rp14.940.000. Alokasi biaya pengembangan SDM dilakukan berdasarkan jumlah guru dan karyawan yang terlibat, yakni 35 orang, sehingga tarif alokasi per orang sebesar Rp426.857 digunakan sebagai dasar pembebanan biaya ke aktivitas lain.

Untuk aktivitas administrasi sekolah, biaya yang muncul mencakup pembelian perlengkapan, honor tenaga kependidikan non-PNS, serta berbagai biaya operasional administrasi lainnya,

dengan total mencapai Rp130.517.368. Karena tidak ditemukan *cost driver* yang tepat, pembebanan biaya administrasi sekolah dialokasikan secara proporsional ke empat aktivitas utama, yaitu belajar mengajar, kesiswaan, manajemen sekolah, dan pengelolaan sarana prasarana, masing-masing sebesar 25%.

Selanjutnya, biaya manajemen sekolah yang mencakup pembuatan dan pemeliharaan *website*, penyusunan dokumen perencanaan, serta biaya daya dan jasa dan pengembangan SDM, berjumlah Rp39.201.190. Biaya ini kemudian dibebankan ke pusat-pusat pertanggungjawaban yang terdiri dari wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, humas, dan guru, masing-masing menerima alokasi sebesar 20%. Dari pusat-pusat ini, biaya manajemen sekolah dialokasikan kembali ke aktivitas lain sesuai proporsi manfaat yang diterima.

Terakhir, aktivitas pengelolaan sarana dan prasarana mencakup berbagai pengeluaran seperti pemeliharaan bangunan, peralatan kantor, langganan koran dan majalah, serta pembelian perlengkapan kebersihan, dengan total biaya mencapai Rp217.827.639. Pembebanan biaya ke aktivitas utama dilakukan berdasarkan luas ruangan, dengan total 2.173 m² yang terdiri dari 1.984 m² untuk aktivitas belajar mengajar dan 189 m² untuk aktivitas kesiswaan. Tarif *cost driver* yang digunakan sebesar Rp100.243 per m², menghasilkan pembebanan sebesar Rp198.881.747 untuk aktivitas belajar mengajar dan Rp18.945.892 untuk kesiswaan.

SMP Muhammadiyah 3 Depok

SMP Muhammadiyah 3 Depok mengalokasikan biaya daya dan jasa untuk kebutuhan operasional sekolah seperti listrik, telepon, dan internet sebesar Rp72.000.000. Biaya ini dibebankan ke aktivitas-aktivitas di sekolah menggunakan pendekatan luas bangunan seluas 3.038,1 m² sebagai *cost driver*. Berdasarkan pendekatan tersebut, ditetapkan tarif *cost driver* sebesar Rp23.699 per m² yang kemudian digunakan untuk mengalokasikan biaya daya dan jasa ke aktivitas lain.

Biaya kegiatan sosial di SMP Muhammadiyah 3 Depok berjumlah Rp33.650.000, terdiri atas kegiatan bakti sosial, ta'niah/ta'ziah, dan bantuan sosial. Karena biaya ini tidak secara langsung terkait dengan aktivitas tertentu dan tidak memiliki *driver* yang spesifik, maka alokasinya dilakukan secara proporsional dengan membagi rata ke seluruh aktivitas utama. Setiap aktivitas menerima alokasi sebesar 14,29% dari total biaya kegiatan sosial. Pendekatan ini dipilih untuk mencerminkan distribusi yang adil dalam kondisi tidak tersedianya dasar pengukuran pembebanan yang lebih tepat.

Pengeluaran untuk pengembangan sekolah non-SDM yang meliputi pemeliharaan gedung dan kegiatan fisik sekolah lainnya tercatat sebesar Rp42.807.143. Alokasi pembebanan biaya ini dilakukan berdasarkan luas ruangan yang digunakan oleh masing-masing aktivitas. Dengan luas total 3.038,1 m², diperoleh tarif *cost driver* sebesar Rp14.090 per m². Aktivitas ini kemudian dibebankan ke aktivitas lainnya.

Untuk pengembangan SDM, SMP Muhammadiyah 3 Depok mencatat total biaya sebesar Rp142.733.143. Biaya ini mencakup berbagai kegiatan pelatihan, pembinaan, dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Pembebanan biaya dilakukan berdasarkan jumlah guru dan karyawan yang relevan dengan masing-masing aktivitas, dengan total jumlah personel sebanyak 34 orang. Tarif *cost driver* ditentukan sebesar Rp4.198.034 per orang, dan digunakan untuk membagi biaya ke aktivitas lainnya.

Aktivitas administrasi sekolah menanggung biaya sebesar Rp398.228.329, yang mencakup pengadaan alat tulis kantor, mebel, seragam, biaya honorarium tenaga kependidikan, dan sejumlah kebutuhan administratif lainnya. Karena tidak ditemukan *driver* yang spesifik, pembebanan dilakukan secara proporsional dan dibagi rata ke empat aktivitas utama, yaitu belajar mengajar, kesiswaan, manajemen sekolah, dan pengelolaan sarana prasarana. Masing-masing aktivitas menerima 25% dari total biaya administrasi sekolah tersebut.

Selanjutnya, aktivitas manajemen sekolah mencakup biaya sebesar Rp393.624.263, yang

meliputi pengeluaran untuk penyusunan program, rapat dinas, supervisi, pengembangan sistem informasi, promosi sekolah, serta honorarium tenaga kependidikan. Pembebanan awal dilakukan ke pusat-pusat pertanggungjawaban seperti Waka Kurikulum, Waka Ismuba, Waka Kesiswaan, Waka Sarana Prasarana, dan guru. Kemudian, biaya dari pusat pertanggungjawaban tersebut dibebankan ke aktivitas lainnya berdasarkan peran dan fungsi masing-masing.

Terakhir, pengelolaan sarana dan prasarana melibatkan biaya sebesar Rp444.992.794, yang mencakup pemeliharaan fasilitas, langganan koran, sewa tanah dan bangunan, serta pajak. Biaya ini juga termasuk pembebanan dari aktivitas lain seperti manajemen sekolah, administrasi sekolah, dan pengembangan SDM maupun non-SDM. Pembebanan ke aktivitas utama dilakukan berdasarkan luas ruangan yang digunakan untuk aktivitas belajar mengajar dan kesiswaan, yaitu sebesar 1.173 m². Dihitung tarif *cost driver* sebesar Rp379.363 per m², yang digunakan sebagai dasar alokasi biaya ke dua aktivitas tersebut.

Pengumpulan Biaya dalam Cost Pool

Biaya yang telah dialokasikan ke aktivitas belajar mengajar dan kesiswaan dianalisis sesuai dengan karakteristiknya. Selanjutnya, biaya yang memiliki *driver* sama dikelompokkan ke dalam *activity cost pool*. Di SMP Negeri 2 Depok dan SMP Muhammadiyah 3 Depok, *cost pool* dalam aktivitas belajar mengajar terdiri dari enam kategori, yaitu antarrombel, seluruh siswa, kelas VII, kelas VIII, kelas IX, dan berdasarkan jam pelajaran. Masing-masing kategori merepresentasikan metode pembebanan yang berbeda sesuai dengan objek dan sifat aktivitas pendidikan di sekolah. Sementara itu, untuk aktivitas kesiswaan, pengelompokan *cost pool* terdiri berdasarkan kelompok siswa tertentu, seperti kelas VII, kelas VIII, gabungan kelas VII dan VIII, kelas IX, serta seluruh siswa.

Identifikasi Cost Driver dan Perhitungan Tarif Cost Driver

Identifikasi *cost driver* dan perhitungan tarif *cost driver* dilakukan untuk memperoleh tarif per unit biaya pada setiap aktivitas pendidikan yang telah

dikelompokkan dalam *activity cost pool*. Tarif *cost driver* untuk aktivitas belajar mengajar dan kesiswaan diperoleh dari pembagian total biaya dengan *driver*. Di SMP Negeri 2 Depok, tarif *cost driver* untuk *activity cost pool* KBM: antarrombel Rp6.448.989, seluruh siswa Rp135.670, kelas VIII Rp57.079, kelas IX Rp198.627, dan berdasarkan jam pelajaran Rp23.043. Untuk aktivitas kesiswaan, tarif *cost driver* untuk *activity cost pool* kesiswaan: kelas VII Rp118.304 dan seluruh siswa Rp237.185. Sementara itu, SMP Muhammadiyah 3 Depok menunjukkan tarif *cost driver* untuk *activity cost pool* KBM: antarrombel Rp19.280.768, seluruh siswa Rp2.073.469, kelas VII Rp1.118.638, kelas VIII Rp218.944, kelas IX Rp1.029.506, dan berdasarkan jam pelajaran Rp81.616. Selanjutnya untuk aktivitas kesiswaan, tarif *cost driver* untuk *activity cost pool* kesiswaan: kelas VII Rp376.866, kelas VIII Rp868.053, kelas IX Rp340.212, gabungan kelas VII dan VIII Rp265.764, dan seluruh siswa Rp924.858.

Perhitungan Unit Cost Siswa Per Tingkat Berdasarkan Metode ABC

Biaya satuan siswa di SMP Negeri 2 Depok per tahun berbeda untuk setiap kelas, dengan biaya kelas VII Rp1.708.020, kelas VIII Rp1.646.795, dan kelas IX Rp1.636.044, padahal dana bantuan pemerintah yang diterima sama untuk semua tingkat. Dana BOS dan BOSDA sebesar Rp1.655.000 per siswa hanya cukup untuk kebutuhan kelas VIII dan IX secara terbatas, namun tidak mencukupi untuk kelas VII, sehingga dana yang ada dianggap belum memenuhi seluruh kebutuhan operasional sekolah. Meskipun terdapat perbedaan nilai yang relatif kecil, perhitungan sederhana telah memberikan estimasi biaya yang cukup mendekati akurat dan tidak memberikan dampak material terhadap pengambilan keputusan. Namun, metode ABC dinilai lebih akurat karena mampu mempertimbangkan karakteristik unik dari setiap aktivitas sehingga pembebanan biaya menjadi lebih spesifik dan tidak bersifat generalisasi.

Hal sama terjadi pada biaya satuan siswa per tahun di SMP Muhammadiyah 3 Depok yang berbeda untuk setiap tingkat. Biaya tertinggi ada pada kelas VII Rp9.280.004, menurun di kelas VIII

Rp8.616.826, dan naik kembali di kelas IX Rp8.788.701. Sekolah ini membagi kelas menjadi kelas kreatif dan digital saat penelitian dilakukan, hasil menunjukkan biaya yang berbeda untuk masing-masing jenis kelas. Satuan siswa per tahun menjadi, kelas VII kreatif Rp10.982.898, kelas VIII kreatif Rp8.719.368, kelas IX kreatif Rp8.203.615, kelas VII digital Rp10.368.251, dan kelas VIII digital Rp9.236.046.

Biaya satuan di SMP Muhammadiyah 3 Depok secara keseluruhan jauh lebih tinggi dibandingkan dana BOS dan BOSDA sebesar Rp1.610.000. Hal tersebut menunjukkan bahwa tiap kelas menanggung beban konsumsi aktivitasnya masing-masing. Namun, jika hanya mengandalkan dana BOS dan BOSDA, biaya operasional sekolah tidak dapat tertutupi. Perbedaan nilai antara metode ABC dan metode perhitungan sekolah bukan merupakan ketidaktepatan, melainkan hasil dari pendekatan alokasi yang berbeda. Metode ABC memberikan estimasi lebih rinci dan representatif karena mempertimbangkan karakteristik setiap aktivitas, sementara metode sekolah menyamaratakan beban antar-kelas. Oleh karena itu, metode ABC dinilai lebih akurat.

3. Analisis Penetapan Biaya Sekolah

Hasil analisis menunjukkan perbedaan sumber dana antara SMP Negeri 2 Depok dan SMP Muhammadiyah 3 Depok. Kedua sekolah memperoleh pendanaan dari pemerintah pusat melalui dana BOS, dana BOSDA dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, dan dana komite. Namun, SMP Muhammadiyah 3 Depok diperbolehkan menarik pungutan dari siswa atau orang tua/wali, sedangkan SMP Negeri 2 Depok tidak diizinkan melakukan hal tersebut.

Pengelolaan dana di kedua sekolah mencakup tahapan perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan. SMP Negeri 2 Depok dan SMP Muhammadiyah 3 Depok telah menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS) secara optimal. Prinsip MBS yang diatur oleh Mendikbudristek mewajibkan sekolah untuk mengelola biaya sesuai dengan klasifikasi 8 Standar Nasional Pendidikan. Kedua sekolah telah mengelola dana sesuai dengan 8 standar tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku serta kegiatan

yang telah direncanakan sekolah. Selanjutnya, laporan atas penggunaan dana BOSDA oleh sekolah kemudian disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman melalui dokumen validasi pertanggungjawaban.

Meskipun pengelolaan dana telah berjalan sesuai regulasi, kedua sekolah menghadapi kendala keterlambatan pencairan dana, yang berdampak pada pembiayaan kegiatan dan pelaporan keuangan. SMP Muhammadiyah 3 Depok masih dapat mengatasi kendala tersebut melalui dukungan SPP. Sebaliknya, keterlambatan dana sangat menyulitkan SMP Negeri 2 Depok dalam memenuhi kebutuhan operasional sekolah secara tepat waktu.

4. Kebutuhan dan Kecukupan Dana BOSDA

Analisis kualitatif mengenai kecukupan dan kebutuhan menunjukkan bahwa dana BOSDA yang diterima oleh SMP Negeri 2 Depok dan SMP Muhammadiyah 3 Depok masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan 8 standar nasional pendidikan. Kekurangan paling terasa adalah dalam pemenuhan sarana prasarana serta honorarium guru dan karyawan. Hal tersebut mengakibatkan sekolah tidak sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhannya. SMP Negeri 2 Depok menyatakan bahwa sekolah harus “pandai-pandai” dalam mengupayakan penerimaan sumbangan sukarela dari orang tua/wali siswa. Sementara SMP Muhammadiyah 3 Depok, meskipun memiliki fleksibilitas dalam menutupi kekurangan melalui iuran bulanan, tetap menghadapi tantangan ketika orang tua mengalami kesulitan dalam pembayaran. Untuk mengatasi hal tersebut, sekolah memberikan dispensasi pembayaran hingga siswa menyelesaikan masa studi.

5. Pengembangan Teori

Teori institusional digunakan untuk memahami perilaku organisasi dalam menyesuaikan diri dengan tekanan eksternal demi memperoleh legitimasi. Di sektor pendidikan, homogenitas organisasi sekolah sering kali dipengaruhi oleh tekanan regulatif, norma profesional, maupun kondisi lingkungan yang tidak pasti (DiMaggio dan Powell, 1983). Berdasarkan hasil analisis yang

dilakukan, SMP Negeri 2 Depok dan SMP Muhammadiyah 3 Depok, teridentifikasi dua bentuk utama isomorfisme, yaitu isomorfisme koersif dan isomorfisme normatif. Sementara itu, isomorfisme mimetik tidak muncul secara signifikan karena penetapan biaya didasarkan pada manajemen berbasis sekolah yang memberi kewenangan penuh kepada sekolah untuk merencanakan, mengelola, dan melaporkan biaya sesuai kebutuhan masing-masing.

Isomorfisme koersif terlihat jelas melalui kewajiban sekolah untuk mematuhi regulasi dari Pemerintah Kabupaten Sleman terkait pengelolaan dana BOSDA. Salah satu responden menyatakan, "Dinas dan pemerintah sangat ketat, proposal atau laporan yang belum selesai, disegerakan. Pokoknya dana belum cair kalau laporan belum lengkap." (N1-16). Tekanan regulatif ini menciptakan keseragaman prosedur administrasi antar sekolah, namun juga berimplikasi pada keterbatasan fleksibilitas sekolah dalam menyesuaikan penggunaan dana dengan kebutuhan spesifik. Dengan kata lain, kepatuhan administratif sering kali menjadi prioritas, sementara efektivitas penggunaan dana belum sepenuhnya tercapai.

Sementara itu, isomorfisme normatif tercermin dari adanya pelatihan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan Dinas Pendidikan untuk kepala sekolah dan bendahara. Seorang responden menyatakan, "Kalau terkait teknis, biasanya bendahara yang sudah mengikuti bimtek lebih memahami cara dan tekniknya." (N4-28). Upaya ini dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas pengelolaan dana. Namun, efektivitasnya masih perlu ditinjau secara kritis. Di satu sisi, pelatihan memberi pemahaman teknis yang lebih baik; di sisi lain, ada kemungkinan pelatihan menjadi formalitas administratif semata tanpa banyak berdampak pada peningkatan kualitas pengelolaan dana di lapangan.

Temuan juga menunjukkan adanya interaksi antara tekanan koersif dan normatif. Tekanan regulatif yang ketat mendorong sekolah untuk aktif mengikuti pelatihan, sehingga keduanya saling melengkapi. Namun, terdapat risiko bahwa

dominasi aspek koersif menjadikan sekolah sekadar patuh pada aturan administratif, sementara dimensi normatif belum sepenuhnya menghasilkan perubahan substantif dalam efektivitas penggunaan dana. Dengan demikian, regulasi yang ketat cenderung lebih berpengaruh pada kepatuhan administratif daripada mendorong inovasi sekolah dalam mengelola anggaran sesuai kebutuhan riil.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, penelitian ini menyimpulkan hal-hal sebagai berikut. Hasil perhitungan biaya satuan per siswa menggunakan metode ABC menunjukkan adanya variasi biaya antar tingkat dan program pendidikan di SMP Negeri 2 Depok dan SMP Muhammadiyah 3 Depok. Variasi ini dipengaruhi oleh jenis program, fasilitas, dan sumber daya yang digunakan. Kedua sekolah memperoleh dana dari sumber yang serupa, yaitu BOS, BOSDA, dan dana Komite. Namun, perbedaan regulasi menyebabkan SMP Negeri tidak dapat menarik pungutan dari siswa, sedangkan SMP Muhammadiyah diperbolehkan menarik iuran bulanan yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah.

Manajemen keuangan di kedua sekolah menerapkan tahapan perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan secara sistematis. Dana BOSDA diklasifikasikan berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan, namun belum sepenuhnya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan, terutama dalam aspek sarana prasarana dan honorarium. Kedua sekolah juga mengalami kendala pencairan dana di awal tahun anggaran yang berdampak pada pelaksanaan program.

Temuan penelitian juga mengidentifikasi adanya praktik isomorfisme koersif dan normatif. Isomorfisme koersif tercermin dari kepatuhan terhadap regulasi dalam penetapan biaya dan penggunaan dana. Sementara itu, isomorfisme normatif tampak dari partisipasi dalam pelatihan serta pemenuhan kompetensi kepala sekolah, yang menunjukkan konvergensi praktik manajerial antar lembaga pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada pengambil kebijakan agar alokasi dana BOSDA lebih proporsional dan fleksibel dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik masing-masing sekolah. Pihak sekolah juga perlu meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan melalui pelatihan teknis dan sistem informasi yang akuntabel. Selain itu, penting bagi sekolah swasta untuk menjaga keseimbangan pungutan agar tidak membebani peserta didik, namun tetap menjamin mutu layanan pendidikan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain tidak tersedianya laporan dana komite di salah satu sekolah, pergantian kepala sekolah yang memengaruhi ketersediaan informasi, serta keterbatasan responden. Implikasi penelitian mencakup kontribusi pada pengembangan kajian biaya pendidikan serta memberikan dasar bagi pengambilan kebijakan yang lebih tepat. Penelitian lanjutan disarankan mencakup lebih banyak sekolah dan melibatkan dinas pendidikan serta komite sekolah untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan mendalam.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Ahyaruddin, Muhammad, dan Rusdi Akbar. 2018. "Indonesian Local Government's Accountability and Performance: the Isomorphism Institutional Perspective." *Jurnal Akuntansi dan Investasi* 19(1). doi:10.18196/jai.190187.
- Ajzenman, Nicolás, Eleonora Bertoni, Gregory Elacqua, Luana Marotta, dan Carolina Méndez Vargas. 2020. Altruism or money? Reducing teacher sorting using behavioral strategies in Peru. <http://www.iadb.org>.
- Akbar, Muhammad Firyal. 2016. "Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara)." *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik* 2(1).
- Aku Pintar. 2024. "SMP NEGERI 2 DEPOK - Aku Pintar." https://akupintar.id/sekolah/-/cari-sekolah/detail_sekolah/smp-negeri-2-depok/83416869.
- Andreti, Ria Maya. 2016. "Analisis Perhitungan Unit Cost Siswa dengan Model Activity Based Costing." *Jurnal Kajian Pendidikan Akuntansi Indonesia*.
- Bhattacharjee, Suchismita, dan Georg Reichard. 2011. "SOCIO-ECONOMIC FACTORS AFFECTING INDIVIDUAL HOUSEHOLD ENERGY CONSUMPTION: A SYSTEMATIC REVIEW." <http://www.asme.org/about-asme/terms-of-use>.
- Coskun, Ali, dan Metin Yilmaz. 2013. "Pricing Decisions in Educational Institutions: An Activity based Approach." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 106:2112–18. doi:10.1016/j.sbspro.2013.12.240.
- Creswell, John W. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- DiMaggio, Paul J., dan Walter W. Powell. 1983. "The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields." *American Sociological Review* 48(2):147–60.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. 2020. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Tahun 2020*.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. 2023. "Data Sekolah Prov. D.I. Yogyakarta." <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/1/040000>.
- Fadoli, M. Irsyad, Teguh Yuwono, dan Tri Yuniningsih. 2021. "Implementasi Kebijakan Sekolah Swasta Gratis di Kota Semarang." *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial* 5(1).
- Hansen, Don R., dan Maryanne M. Mowen. 2007. *Managerial Accounting*. 8th ed. Thomson South-Western.
- Hayatunnida, Jihan, dan Shaleh. 2022. "Analysis of Estimation of Education Unit Costs (Micro Approach and Macro Approach)." *Journal of Educational Management Research* 01(01):24–33.

- Horngren, Charles T., Srikant M. Datar, dan George Foster. 2008. *Akuntansi Biaya: Dengan Penekanan Manajerial*. Jakarta: Erlangga.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik. Republik Indonesia.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2012. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012. Republik Indonesia.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Republik Indonesia.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah. Republik Indonesia.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. 2022. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Republik Indonesia.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2022. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan. Republik Indonesia.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2023. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 3/P/2023 Tentang Satuan Biaya, Penerima Dana, dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler Tahun Anggaran 2023. Republik Indonesia.
- Khattak, Naeem Ur Rehman Khattak, Jangraiz Khan, Muhammad Tariq, dan Sajjad Tasleem. 2010. "Determinants of Parents' Choice in Selection of Private Schools for Their Children in District Peshawar of Khyber Pakhunkhwa Province." Munich Personal RePEc Archive.
- Lawrentiis, Lisa, dan Harry Andrian Simbolon. 2014. "Activity Based Costing." <https://akuntansiterapan.com/2014/02/17/activity-based-costing/>.
- Maidah, Annisa Nur, Daud Kondorura, dan Rita Kala Linggi. 2018. "Studi tentang Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara." 6(4):1765–74.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. 1994. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. 2nd ed. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. 2022. Peraturan Bupati Sleman Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah. Republik Indonesia.
- Perwita, Dyah, dan Retno Widuri. 2022. "Telaah pendidikan: preferensi orang tua memilih sekolah swasta daripada sekolah negeri." *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan pembelajarannya*. doi:10.25273/equilibrium.
- Putra, Rizki Rachmatullah Catur, dan Amrie Firmansyah. 2022. "Activity Based Costing dalam Penentuan Biaya Pendidikan per Siswa pada

- Madrasah Aliyah Pondok Pesantren X Pacitan." *Akuntansiku* 1(1).
- Putri, Ummul Hanifah. 2019. "Efektivitas dan Efisiensi Pembiayaan Pendidikan."
- Rekasari, Meli Haryati. 2020. "Efektivitas Pengelolaan Keuangan Sekolah (Study Evaluatif di SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan)." *JURNAL MANAJER PENDIDIKAN* 14(2):83–91. www.DetikNews.com.
- Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Saputra, Agung. 2018. "Allocation of Education Budget in Indonesia." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal* 1(2):2615–1715. www.birci-journal.com.
- Suara Muhammadiyah. 2018. "Tim Robotik SMP Muhammadiyah 3 Depok Berjaya di Thailand."
- Sumardiningsih, Sri, Sugiharsono, Mimin Nur Aisyah, dan Aula Ahmad Hafidh Saiful Fikri. 2018. "Model Activity Based Costing pada Sekolah Menengah Kejuruan." *Jurnal Ekonomi & Pendidikan* 15(1).
- Todd, Vicki, dan Jerry C. Hudson. 2007. "Using Graded Peer Evaluation To Improve Students' Writing Skills, Critical Thinking Ability, And Comprehension Of Material In A Principles Of Public Relations Course." *Journal of College Teaching & Learning* 4(10):39–46.
- Winarni, Dwi, dan Luthfi Zamakhsyari. 2021. "Analisis Kualitas Informasi Akuntansi melalui Pendekatan Teori Institusional Isomorfisme." *JRAK Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 7(2).
- Zainudin, Moh. 2019. "PENYELEWENGAN DANA BOS DAPAT TERJADI KARENA KURANGNYA TRANSPARANSI PIHAK SEKOLAH TERHADAP PUBLIK." *Jendela Hukum* 6:32–38.
- Zancajo, Adrián, Antoni Verger, dan Clara Fontdevila. 2022. "The instrumentation of public subsidies for private schools: Different regulatory models with concurrent equity implications." *European Educational Research Journal* 21(1):44–70. doi:10.1177/14749041211023339.
- Zuilkowski, Stephanie Simmons, Benjamin Piper, Salome Ong'ele, dan Onesmus Kiminza. 2018. "Parents, quality, and school choice: why parents in Nairobi choose low-cost private schools over public schools in Kenya's free primary education era." *Oxford Review of Education* 44(2):258–74. doi:10.1080/03054985.2017.1391084.